OPTIMALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM MENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Yogi Zulkarnain Hutabarat
NPP. 33.0118
Program Studi Keuangan Publik
Email: yogihutabarat5@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Robert Simbolon, M.PA.
Email: robert.simbolon@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Existing research on market service retribution has primarily focused on management practices, collection strategies, and general contributions to local revenue. However, there is a gap in understanding the extent to which market service retribution optimally contributes to Local Own-Source Revenue (PAD) in North Padang Lawas Regency. Despite its strategic role as a primary source of retribution revenue, actual realization remains below targets, indicating a research gap in analyzing its optimization within the regional financial context.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the optimization of market service retribution revenue in increasing Local Own-Source Revenue (PAD) in North Padang Lawas Regency.* ***Method:*** *A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and document analysis involving officials from the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD), the Department of Trade, market management officers, and market traders. Data analysis followed stages of reduction, presentation, and conclusion drawing to provide a comprehensive understanding of market service retribution management.* ***Result:*** *Findings indicate that the effectiveness of revenue collection, administrative efficiency, transparency and accountability, and digitalization in market service retribution have varied levels of implementation. Realization rates demonstrate fluctuations across the period 2020–2024, with contributions of market service retribution to PAD remaining low. Indicators show that administrative processes are partially manual, transparency in reporting is uneven, digital systems are limited, and timely collection rates fluctuate, reflecting partial achievement of optimization dimensions.* ***Conclusion:*** *Market service retribution in North Padang Lawas Regency contributes to Local Own-Source Revenue (PAD), but the optimization across effectiveness, efficiency, transparency, and digitalization remains incomplete, confirming that revenue potential has not been fully realized in the context of regional financial management.*

Keywords: *Local Own-Source Revenue; Market Service Retribution; Optimization; Regional Finance; Revenue Management.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penelitian terkait optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif rendah. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada pengelolaan, efektivitas pemungutan, atau kontribusi retribusi pasar terhadap PAD, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan

akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi pada Kabupaten Padang Lawas Utara masih terbatas. Selain itu, realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar selama periode 2021–2024 belum mencapai target yang ditetapkan sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelola pasar, petugas pemungut retribusi, dan pedagang pasar. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar ditinjau dari dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi belum terlaksana secara optimal. Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar mengalami fluktuasi dan sebagian besar belum mencapai target yang ditetapkan. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD masih relatif rendah. Selain itu, pengelolaan administrasi, pelaporan, keterbukaan informasi, serta penerapan sistem digital dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar masih menunjukkan tingkat implementasi yang terbatas. **Kesimpulan:** Optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana secara optimal sehingga potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya terealisasi.

Kata Kunci: Keuangan Daerah; Optimalisasi; Pendapatan Asli Daerah; Retribusi Pelayanan Pasar.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desentralisasi fiskal menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan modern karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri sesuai kebutuhan masyarakat. Secara global, penguatan pendapatan lokal tidak hanya dipahami sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai ukuran kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan pembangunan (Vidyattama, 2021; Sueb et al., 2025; Wang et al., 2024). Pemerintah daerah dituntut meningkatkan efektivitas sumber pendapatan yang sah, termasuk pajak dan retribusi, agar mampu mendukung pembiayaan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya. Retribusi daerah memiliki kedudukan penting karena merupakan pungutan atas pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah, sekaligus instrumen untuk menilai kualitas pelayanan publik daerah (Hasanah et al., 2025; Syahrimi et al., 2025).

Meskipun kewenangan fiskal telah diperluas, tingkat kemandirian keuangan banyak daerah masih terbatas, karena dominannya pendapatan transfer. Kajian IPDN menunjukkan rendahnya kemandirian daerah berkaitan dengan dominasi transfer, fluktuasi PAD, dan belum maksimalnya pemetaan potensi PAD (Syam & Zulfikar, 2022; Tumija & Sinta, 2022). Oleh karena itu, penguatan PAD melalui retribusi daerah penting dilakukan, terutama pada daerah kabupaten yang memiliki basis ekonomi lokal berupa pasar tradisional dan fasilitas publik.

Retribusi pelayanan pasar merupakan jenis retribusi yang relevan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pasar tradisional berfungsi sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok dan ruang interaksi ekonomi, sekaligus sumber penerimaan daerah. Dalam perspektif keuangan publik, retribusi

pelayanan pasar idealnya dikelola berdasarkan prinsip efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi. Penelitian nasional menunjukkan retribusi pasar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi kontribusinya sering kali rendah karena realisasi penerimaan belum sebanding dengan potensi (Susilo, 2022; Leilani & Wulandari, 2023; Safitri & Sari, 2022; Usfomeny et al., 2024; Ermawati & Mutiara, 2024).

Fenomena serupa terlihat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada tahun 2024, total pendapatan daerah tercatat Rp1.250,28 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp1.188,05 miliar atau 95,03% dari total pendapatan, lebih tinggi dibanding daerah lain di sekitarnya. Realisasi PAD tahun 2020–2024 fluktuatif, misalnya Rp51,97 miliar pada 2020, Rp43,31 miliar pada 2021, dan meningkat menjadi Rp50,66 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap transfer dan kapasitas PAD yang belum optimal.

Data retribusi pasar menunjukkan realisasi yang bervariasi. Pada 2020 tercapai Rp385,06 juta atau 97,7% dari target, tahun 2021 Rp438,16 juta atau 57,2% dari target, tahun 2022 Rp318,75 juta atau 51,4%, tahun 2023 Rp434,55 juta atau 65,1%, dan 2024 Rp409,50 juta atau 66,1%. Kontribusi terhadap PAD juga rendah, yakni 0,74% pada 2020, meningkat menjadi 1,01% pada 2021, dan kembali menurun menjadi 0,81% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pasar sebagai sumber PAD belum sepenuhnya terealisasi.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep optimalisasi pendapatan daerah yang menekankan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan (Nurcholis, 2018). Intensifikasi meningkatkan efektivitas pemungutan dari sumber yang ada, sedangkan ekstensifikasi memperluas basis penerimaan. Dimensi optimalisasi dalam penelitian ini meliputi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi. Kajian IPDN menegaskan digitalisasi e-retribusi penting untuk mencegah kebocoran PAD dan memperkuat tata kelola penerimaan (Suryanata & Felani, 2023; Rahmadany, 2024).

Kondisi ideal pengelolaan retribusi pasar mencakup pencapaian target penerimaan, data wajib retribusi akurat, pemungutan tertib, administrasi transparan, dan kontribusi signifikan terhadap PAD (Eljawati & Nurafdaliana, 2024; Sueb et al., 2025). Kondisi aktual menunjukkan realisasi penerimaan yang belum mencapai target, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD rendah, dan implementasi dimensi optimalisasi masih terbatas. Hal ini menegaskan urgensi penelitian untuk memberikan gambaran akademik mengenai pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Padang Lawas Utara, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah (Susilo, 2022; Leilani & Wulandari, 2023; Safitri & Sari, 2022; Usfomeny et al., 2024; Ermawati & Mutiara, 2024).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kajian mengenai retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah banyak dilakukan baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, penelitian mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah berkontribusi terhadap penguatan kapasitas fiskal dan kualitas pelayanan publik daerah (Wang et al., 2024). Penelitian lain menemukan bahwa optimalisasi sumber pendapatan lokal merupakan instrumen penting dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah (Vidyattama, 2021). Selain itu, studi mengenai pengelolaan pendapatan daerah menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan dan tata kelola penerimaan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sueb et al., 2025). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada hubungan desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal, dan kinerja keuangan secara umum, sehingga belum secara spesifik mengkaji optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu komponen PAD.

Pada tingkat nasional, hasil penelitian mengenai retribusi pelayanan pasar menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian mengenai optimalisasi retribusi pelayanan pasar menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah (Susilo, 2022). Penelitian lain menunjukkan bahwa retribusi pelayanan pasar memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kontribusinya relatif kecil dibandingkan sumber PAD lainnya (Leilani & Wulandari, 2023). Sementara itu, penelitian di Kota Kupang

menyimpulkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar belum selalu diikuti oleh kontribusi yang signifikan terhadap PAD (Usfomeny et al., 2024). Hasil serupa juga ditemukan bahwa meskipun tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar tergolong baik, kontribusinya terhadap PAD masih berada pada kategori rendah (Safitri & Sari, 2022). Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi temuan penelitian mengenai hubungan antara optimalisasi retribusi pelayanan pasar dan peningkatan PAD. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas, efisiensi, kontribusi, atau implementasi sistem retribusi pada daerah tertentu tanpa mengkaji optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar secara komprehensif melalui dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi.

Dari perspektif akademik pemerintahan, karya dosen IPDN menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah memerlukan optimalisasi sumber-sumber PAD yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah (Rahmadany, 2024; Syam & Zulfikar, 2022). Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan PAD pada Kabupaten Padang Lawas Utara masih sangat terbatas. Dengan demikian, research gap penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi. Penelitian ini sekaligus mengisi kesenjangan empiris akibat masih rendahnya kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD meskipun sektor pasar memiliki potensi ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki urgensi teoritis karena berkontribusi pada pengembangan kajian keuangan publik daerah, khususnya terkait optimalisasi sumber-sumber PAD melalui retribusi daerah. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, kemampuan pemerintah daerah mengelola sumber pendapatan lokal merupakan indikator penting kemandirian keuangan daerah dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Wang et al., 2024). Penelitian ini juga relevan untuk memperkaya kajian mengenai optimalisasi pendapatan daerah yang menekankan pentingnya efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, dan transformasi digital dalam tata kelola penerimaan daerah (Rahmadany, 2024; Suryanata & Felani, 2023). Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus mengkaji optimalisasi retribusi pelayanan pasar pada daerah dengan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi seperti Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini penting karena retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber PAD yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi empiris mengenai kondisi pengelolaan retribusi pelayanan pasar sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengelolaan PAD yang lebih efektif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Urgensi kebijakan ini semakin penting mengingat transformasi digital dan tata kelola keuangan daerah yang baik terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pendapatan daerah dan penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah (Vidyattama, 2021; Hasanah et al., 2025; Syam & Zulfikar, 2022).

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian internasional menunjukkan adanya fokus pada kontribusi pendapatan daerah dan mekanisme pengelolaannya sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Penelitian mengenai desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan lokal

berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik secara efektif (Wang et al., 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki (Vidyattama, 2021). Berbagai penelitian internasional tersebut memberikan landasan teoritis mengenai pentingnya optimalisasi pendapatan daerah, namun belum secara khusus membahas optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tingkat nasional, penelitian mengenai retribusi pelayanan pasar telah banyak dilakukan dengan fokus yang beragam. Penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemungutan tergolong baik, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah (Safitri & Sari, 2022). Penelitian lain menemukan bahwa penerimaan retribusi pasar memberikan kontribusi terhadap PAD, tetapi besarnya kontribusi tersebut belum signifikan dibandingkan sumber PAD lainnya (Indah et al., 2025). Hasil serupa juga ditemukan pada penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD masih berada pada kategori rendah meskipun penerimaannya mengalami peningkatan (Pulukadang et al., 2025). Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa retribusi pasar memiliki potensi sebagai sumber PAD, namun realisasi penerimaannya belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang tersedia (Assyarif, 2025). Sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada aspek kontribusi, efektivitas, atau efisiensi penerimaan retribusi pasar.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian internasional lebih banyak membahas desentralisasi fiskal dan kapasitas pendapatan daerah secara umum (Vidyattama, 2021; Wang et al., 2024), sedangkan penelitian nasional cenderung berfokus pada kontribusi, efektivitas, dan efisiensi retribusi pasar terhadap PAD (Safitri & Sari, 2022; Indah et al., 2025; Pulukadang et al., 2025; Assyarif, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara secara lebih komprehensif melalui dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian terdahulu sekaligus memberikan kontribusi empiris pada kajian keuangan publik daerah.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek objek dan lokasi penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji retribusi pelayanan pasar pada daerah yang memiliki karakteristik ekonomi dan tingkat kemandirian fiskal berbeda, seperti Kabupaten Blitar, Kabupaten Pekalongan, Kota Kupang, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Jombang. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat dan kontribusi retribusi pelayanan pasar yang masih relatif rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Susilo, 2022; Leilani & Wulandari, 2023). Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris yang lebih spesifik mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada daerah dengan kapasitas fiskal yang masih terbatas.

Kajian mengenai optimalisasi penerimaan daerah dan penguatan kemandirian fiskal terus berkembang dalam literatur administrasi publik dan keuangan daerah. Dalam konteks internasional, penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang didukung oleh tata kelola pemerintahan

yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah dan kualitas pelayanan publik (Wang et al., 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa otonomi fiskal memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (Vidyattama, 2021). Temuan serupa juga menunjukkan bahwa kualitas institusi dan tata kelola fiskal memiliki hubungan positif terhadap efektivitas pengelolaan pendapatan daerah (Hasanah et al., 2025; Syahrimi et al., 2025; Sueb et al., 2025). Dari perspektif akademik kepamongprajaan, pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi perhatian para akademisi IPDN. Kajian mengenai administrasi pemerintahan daerah menekankan bahwa optimalisasi pendapatan daerah harus didukung oleh tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi (Rahmadany, 2024). Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah merupakan prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah (Wasistiono & Simangunsong, 2015). Perspektif pemerintahan daerah juga menjelaskan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien (Bahrullah Akbar, 2020; Gatiningsih & Sutrisno, 2017; Pitono & Kartiwi, 2020; Taliziduhu Ndraha, 2015). Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak hanya dipandang sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada aspek metode dan teori yang digunakan. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kontribusi, efektivitas, atau efisiensi retribusi pasar terhadap PAD, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar (Usfomeny et al., 2024; Safitri & Sari, 2022). Selain itu, penelitian ini menggunakan teori optimalisasi pendapatan daerah yang dikemukakan oleh Nurcholis (2018) dengan fokus pada dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi (Rahmadany, 2024; Suryanata & Felani, 2023). Penggunaan dimensi tersebut memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya berfokus pada aspek efektivitas atau kontribusi penerimaan retribusi.

Dari sisi temuan, kebaruan penelitian ini terletak pada hasil analisis yang menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana secara optimal pada seluruh dimensi yang diteliti (Syam & Zulfikar, 2022; Vidyattama, 2021). Temuan ini memberikan kontribusi ilmiah berupa gambaran mengenai kondisi aktual pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang tidak hanya dilihat dari capaian penerimaan, tetapi juga dari aspek efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaannya. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian terdahulu sekaligus memperluas kajian mengenai optimalisasi retribusi pelayanan pasar dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada daerah dengan tingkat kemandirian fiskal yang masih rendah.

1.6 Tujuan

Berdasarkan latar belakang, kesenjangan penelitian, dan fokus permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Desain deskriptif dipilih karena penelitian ini menekankan penggambaran fenomena aktual di lapangan secara sistematis, faktual, dan akurat, tanpa manipulasi variabel, sehingga dapat menggambarkan kondisi optimalisasi retribusi pasar berdasarkan dimensi yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian adalah memahami proses, praktik, dan fenomena pengelolaan retribusi pelayanan pasar secara mendalam, termasuk efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi dalam konteks peningkatan PAD. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali informasi rinci dari para informan dan dokumen pendukung untuk memperoleh pemahaman yang holistik.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, dengan fokus pada pasar tradisional dan instansi pemerintah terkait pengelolaan retribusi, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi lokasi dengan objek penelitian, yakni penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai sumber PAD, serta ketersediaan data dan dokumen yang mendukung analisis optimalisasi.

Informan penelitian terdiri dari pejabat BPKPD, pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pengelola pasar, petugas pemungut retribusi, dan pedagang pasar. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan, pengawasan, dan pembayaran retribusi pelayanan pasar, sehingga informasi yang diperoleh relevan dan representatif terhadap fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan praktik pengelolaan retribusi pasar dari para informan. Observasi dilakukan untuk memverifikasi praktik pemungutan, administrasi, dan penggunaan sistem digital di lapangan. Dokumentasi berupa data resmi penerimaan retribusi pasar, laporan PAD, serta regulasi terkait dijadikan sumber data sekunder untuk memperkuat validitas temuan.

Teknik analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif dan deskriptif untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar-dimensi optimalisasi retribusi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan di lapangan, data dokumen, dan triangulasi antar-sumber data.

Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, termasuk pejabat, petugas, dan pedagang pasar. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah ini memastikan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas dan akurasi yang tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjadi dasar analisis optimalisasi retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Padang Lawas Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pemungutan

Efektivitas pemungutan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam teori optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas menjadi indikator utama keberhasilan intensifikasi penerimaan karena mencerminkan sejauh mana potensi yang tersedia dapat dikonversi menjadi penerimaan riil (Nurcholis, 2018).

Tabel 1.

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020–2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2020	393.945.000	385.057.000	97,70%
2021	765.312.000	438.158.000	57,20%
2022	619.260.000	318.752.000	51,40%
2023	667.302.000	434.553.000	65,10%
2024	619.260.000	409.495.000	66,10%

Sumber: BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara (2025)

Berdasarkan Tabel 1., tingkat realisasi retribusi pelayanan pasar selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi sebesar 97,7%, sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 51,4%. Pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun realisasi penerimaan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Kepala BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan pasar belum mampu menggambarkan keseluruhan potensi yang tersedia. Informan menyampaikan bahwa realisasi penerimaan masih berada di bawah target dalam beberapa tahun terakhir sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar masih perlu ditingkatkan agar penerimaan yang diperoleh dapat lebih mendekati potensi yang tersedia.

Dalam perspektif teori optimalisasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses intensifikasi penerimaan belum berjalan secara optimal. (Nurcholis, 2018) menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi objek penerimaan, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa seluruh potensi tersebut dapat direalisasikan menjadi penerimaan daerah. Oleh karena itu, tingkat realisasi yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan belum sepenuhnya mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Safitri & Sari, 2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi terhadap PAD. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Usfomeny et al., 2024) yang menyatakan bahwa capaian penerimaan retribusi pasar pada beberapa daerah masih menunjukkan kesenjangan antara target dan realisasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara belum menunjukkan kondisi yang optimal karena realisasi penerimaan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan selama sebagian besar periode penelitian.

3.2 Efisiensi Anggaran

Efisiensi pengelolaan merupakan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan penerimaan daerah secara optimal dengan biaya, waktu, dan tenaga yang minimal. Dalam konteks retribusi pelayanan pasar, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan besarnya penerimaan yang diperoleh, tetapi juga menyangkut ketepatan administrasi, pengelolaan data, pelaporan, dan mekanisme penyetoran retribusi. Menurut teori optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi menjadi bagian penting dalam proses intensifikasi penerimaan karena menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan secara efektif dan ekonomis (Nurcholis, 2018).

Tabel 2.
Ringkasan Temuan Dimensi Efisiensi Pengelolaan

Indikator	Temuan Penelitian
Administrasi pemungutan	Administrasi retribusi masih dilakukan secara manual
Pencatatan penerimaan	Menggunakan pencatatan harian dan rekapitulasi berkala
Pelaporan penerimaan	Disampaikan secara berjenjang kepada instansi terkait
Pengelolaan data wajib retribusi	Pendataan dilakukan berdasarkan objek retribusi yang tersedia
Proses penyetoran	Dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara telah dilaksanakan melalui mekanisme administrasi yang melibatkan petugas pemungut, pengelola pasar, serta perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendapatan daerah. Setiap penerimaan retribusi dicatat oleh petugas pemungut, kemudian direkapitulasi dan dilaporkan kepada instansi terkait sebagai bagian dari proses administrasi penerimaan daerah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar telah memiliki prosedur administrasi yang jelas dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan penerimaan retribusi pelayanan pasar masih didominasi oleh sistem administrasi konvensional. Setiap transaksi penerimaan dicatat dalam dokumen administrasi yang kemudian direkap untuk kebutuhan pelaporan. Mekanisme tersebut memungkinkan seluruh penerimaan dapat terdokumentasi dengan baik, namun memerlukan proses yang relatif lebih panjang dibandingkan sistem pengelolaan berbasis digital. Meskipun demikian, proses administrasi yang berjalan telah mampu mendukung pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar secara rutin.

Dari aspek pengelolaan data, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap objek retribusi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan. Data tersebut digunakan untuk menentukan jumlah objek yang dikenakan retribusi dan sebagai dasar penyusunan target penerimaan. Keberadaan data objek retribusi merupakan unsur penting dalam efisiensi pengelolaan karena berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Pengelolaan data yang baik akan mempermudah proses administrasi dan meningkatkan akurasi pelaporan penerimaan retribusi.

Dalam perspektif teori optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi pengelolaan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya organisasi untuk menghasilkan penerimaan yang optimal (Nurcholis, 2018). Efisiensi tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan

yang diperoleh, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengelola proses administrasi, pencatatan, dan pelaporan secara tepat. Berdasarkan temuan penelitian, mekanisme pengelolaan retribusi pelayanan pasar telah berjalan sesuai prosedur administrasi yang berlaku sehingga mendukung proses penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek efisiensi pengelolaan telah diterapkan dalam penyelenggaraan retribusi pelayanan pasar.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar telah dilaksanakan melalui prosedur administrasi yang terstruktur sehingga mendukung efektivitas penerimaan daerah (Safitri & Sari, 2022). Selain itu, penelitian lain juga menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan retribusi pasar dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam melaksanakan administrasi, pencatatan, dan pelaporan penerimaan secara konsisten (Susilo, 2022). Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efisiensi pengelolaan merupakan komponen penting dalam optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Penelitian lain menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan mempercepat proses pengolahan data penerimaan (Rahmadany, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa efisiensi pengelolaan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan prosedur administrasi, tetapi juga dengan kemampuan organisasi dalam mengelola informasi secara akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, efisiensi pengelolaan menjadi salah satu dimensi yang memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi efisiensi pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara telah berjalan melalui mekanisme administrasi, pencatatan, pelaporan, dan penyetoran yang terstruktur. Proses pengelolaan tersebut mendukung pelaksanaan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, efisiensi pengelolaan menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam proses optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.3 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dimensi penting dalam optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar karena berkaitan dengan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban pengelolaan penerimaan daerah. Dalam perspektif pengelolaan keuangan publik, transparansi diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh proses pemungutan dan pengelolaan retribusi dilakukan secara terbuka, sedangkan akuntabilitas berfungsi memastikan bahwa penerimaan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut teori optimalisasi pendapatan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan daerah sehingga mampu mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Nurcholis, 2018).

Tabel 3.3
Ringkasan Temuan Dimensi Transparansi dan Akuntabilitas

Indikator	Temuan Penelitian
Keterbukaan informasi retribusi	Informasi tarif dan ketentuan retribusi tersedia bagi pedagang
Pencatatan penerimaan	Seluruh penerimaan dicatat dan direkap secara berkala
Pelaporan penerimaan	Dilaksanakan secara berjenjang kepada instansi terkait

Indikator	Temuan Penelitian
Pertanggungjawaban penerimaan	Disampaikan melalui laporan administrasi penerimaan
Pengawasan administrasi	Dilaksanakan melalui mekanisme pengendalian internal

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil penelitian, transparansi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar telah diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai tarif dan ketentuan retribusi kepada para pedagang sebagai wajib retribusi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pedagang untuk mengetahui besaran kewajiban yang harus dibayarkan atas pemanfaatan fasilitas pasar yang disediakan pemerintah daerah. Selain itu, setiap penerimaan retribusi yang diperoleh petugas pemungut dicatat dan didokumentasikan sebagai bagian dari proses administrasi penerimaan daerah.

Dari aspek akuntabilitas, pengelolaan retribusi pelayanan pasar dilakukan melalui mekanisme pencatatan, rekapitulasi, dan pelaporan penerimaan secara berjenjang. Setiap penerimaan yang diperoleh dari wajib retribusi dicatat oleh petugas pemungut dan selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait untuk direkapitulasi dalam laporan penerimaan daerah. Proses tersebut menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang bertujuan memastikan bahwa seluruh penerimaan retribusi pelayanan pasar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan pasar telah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam pengelolaan penerimaan daerah. Setiap transaksi penerimaan didukung oleh dokumen administrasi yang menjadi dasar dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Keberadaan dokumen tersebut memiliki peran penting dalam menjaga akurasi data penerimaan sekaligus mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi pelayanan pasar.

Dalam perspektif teori optimalisasi pendapatan daerah, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola penerimaan daerah yang baik (Nurcholis, 2018). Transparansi memberikan kepastian informasi kepada wajib retribusi mengenai hak dan kewajibannya, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan. Dengan demikian, kedua aspek tersebut menjadi dasar penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena mampu meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan daerah (Rahmadany, 2024). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan sistem pertanggungjawaban yang jelas berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah (Eljawati & Nurafdaliana, 2024). Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan yang diperoleh, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam proses pengelolaannya.

Selain itu, penelitian mengenai pengelolaan retribusi daerah menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah (Sueb et al., 2025). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi dimensi yang memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dimensi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten

Padang Lawas Utara telah dilaksanakan melalui penyediaan informasi kepada wajib retribusi, pencatatan penerimaan, pelaporan secara berjenjang, dan mekanisme pertanggungjawaban administrasi. Pelaksanaan dimensi tersebut mendukung pengelolaan penerimaan retribusi pelayanan pasar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

3.4 Inovasi dan Digitalisasi

Inovasi dan digitalisasi merupakan dimensi penting dalam optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar karena berkaitan langsung dengan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan retribusi. Transformasi digital diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan dan efisiensi pengelolaan, mengurangi potensi kesalahan administrasi, serta mempermudah pengawasan terhadap penerimaan (Rahmadany, 2024). Dalam konteks teori optimalisasi pendapatan daerah, inovasi dan digitalisasi termasuk dalam upaya memperkuat tata kelola penerimaan dan memastikan seluruh potensi PAD dapat terealisasi secara maksimal (Nurcholis, 2018).

Tabel 4.
Ringkasan Temuan Dimensi Inovasi dan Digitalisasi

Indikator	Temuan Penelitian
Sistem digital pemungutan	Sebagian besar pencatatan masih manual, baru sebagian kecil menggunakan aplikasi digital
Automasi laporan	Pelaporan penerimaan masih dilakukan secara manual, belum berbasis sistem online
Pemanfaatan teknologi informasi	Belum sepenuhnya diintegrasikan dengan database pusat PAD
Inovasi pengelolaan	Terdapat percobaan sistem e-retribusi di beberapa pasar, namun cakupannya terbatas
Integrasi data retribusi	Data belum tersinkronisasi secara real-time dengan instansi terkait

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara masih terbatas. Sebagian besar proses administrasi dan pencatatan penerimaan dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak serta rentan terhadap kesalahan manusia. Upaya digitalisasi baru diterapkan pada sebagian kecil pasar melalui sistem e-retribusi percobaan, namun cakupannya belum menyeluruh dan belum terintegrasi dengan database pusat PAD.

Analisis menunjukkan bahwa keterbatasan penerapan inovasi dan digitalisasi memengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan retribusi. Teori optimalisasi pendapatan daerah menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mempercepat proses pemungutan, mengurangi kebocoran penerimaan, serta meningkatkan keakuratan dan kecepatan laporan keuangan (Nurcholis, 2018). Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmadany (2024) dan Suryanata & Felani (2023) yang menekankan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah secara signifikan dapat memperkuat tata kelola dan meningkatkan kontribusi PAD.

Selain itu, penelitian internasional menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital dan automasi laporan di pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi wajib retribusi dalam membayar kewajiban mereka (Wang et al., 2024; Vidyattama, 2021). Dengan demikian, inovasi dan digitalisasi bukan sekadar pengganti metode manual, tetapi juga

instrumen penting dalam memastikan optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Berdasarkan temuan tersebut, dimensi inovasi dan digitalisasi memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Implementasi digitalisasi yang lebih menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara, sejalan dengan prinsip optimalisasi pendapatan daerah (Nurcholis, 2018; Rahmadany, 2024; Suryanata & Felani, 2023; Wang et al., 2024; Vidyattama, 2021).

3.5 Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap PAD

Dimensi terakhir dalam analisis ini adalah kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Lawas Utara. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun retribusi pelayanan pasar memberikan sumbangan terhadap PAD, besarnya kontribusi masih relatif rendah dibandingkan komponen PAD lainnya. Data realisasi tahun 2020–2024 menunjukkan kontribusi retribusi pasar sebesar 0,74% pada 2020, meningkat menjadi 1,01% pada 2021, namun kembali menurun menjadi 0,81% pada 2024 (BPKPD Kabupaten Padang Lawas Utara, 2025). Hasil ini menunjukkan bahwa potensi retribusi pasar belum sepenuhnya terealisasi sebagai sumber PAD.

Analisis dimensi ini menekankan bahwa peningkatan kontribusi PAD dari retribusi pasar tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif, tetapi juga oleh efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi, akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi yang diterapkan dalam pengelolaan retribusi. Teori optimalisasi pendapatan daerah menegaskan bahwa peningkatan kontribusi PAD memerlukan pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis data (Nurcholis, 2018). Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, potensi penerimaan dari retribusi pelayanan pasar dapat dimaksimalkan sehingga memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kemandirian fiskal daerah.

Penelitian terdahulu di tingkat nasional menunjukkan temuan yang serupa dengan hasil penelitian ini. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah meskipun proses penerimaannya telah dilaksanakan secara efisien (Safitri & Sari, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa retribusi pasar memberikan kontribusi terhadap PAD, namun kontribusinya belum signifikan dibandingkan sumber-sumber PAD lainnya (Susilo, 2022; Leilani & Wulandari, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan retribusi pasar sebagai sumber penerimaan daerah belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD. Hasil penelitian internasional juga menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi digital berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah dan penerimaan pemerintah daerah secara keseluruhan (Wang et al., 2024; Vidyattama, 2021).

Berdasarkan temuan dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD Kabupaten Padang Lawas Utara masih belum optimal. Penerapan dimensi efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan sumbangan retribusi pasar terhadap PAD, sehingga dapat memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah dan mendukung penyelenggaraan pembangunan lokal secara berkelanjutan.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara masih menunjukkan variasi kinerja di setiap dimensi yang diteliti.

Efektivitas pemungutan retribusi pasar tercatat belum konsisten dalam mencapai target yang ditetapkan, dengan realisasi penerimaan yang berfluktuasi antara tahun 2020 hingga 2024. Efisiensi pengelolaan menunjukkan bahwa mekanisme administrasi, pencatatan, dan pelaporan telah dijalankan secara terstruktur, tetapi sebagian besar masih manual, sehingga prosesnya memerlukan waktu dan tenaga lebih banyak (Nurcholis, 2018). Transparansi dan akuntabilitas telah diwujudkan melalui penyampaian informasi tarif retribusi kepada pedagang, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital (Rahmadany, 2024). Dimensi inovasi dan digitalisasi masih terbatas; penerapan e-retribusi hanya dilakukan pada beberapa pasar secara parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh (Suryanata & Felani, 2023).

Analisis temuan ini selaras dengan teori optimalisasi pendapatan daerah yang menekankan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak hanya bergantung pada besarnya potensi objek retribusi, tetapi juga pada efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi digital (Nurcholis, 2018). Efektivitas pemungutan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan, efisiensi pengelolaan berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sementara transparansi dan akuntabilitas serta inovasi digital mendukung kualitas pengelolaan yang meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan akurasi pelaporan. Keempat dimensi ini membentuk kerangka komprehensif untuk menilai optimalisasi penerimaan retribusi pasar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Safitri & Sari, 2022) dan (Susilo, 2022) yang menunjukkan bahwa meskipun retribusi pasar memberikan kontribusi terhadap PAD, besarnya kontribusi masih relatif rendah dan pengelolaan administrasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Temuan ini juga mendukung penelitian (Leilani & Wulandari, 2023) yang menekankan perlunya integrasi digital untuk meningkatkan kontribusi penerimaan retribusi terhadap PAD. Penelitian internasional oleh (Wang et al., 2024) dan (Vidyattama, 2021) menegaskan bahwa penggunaan sistem digital dan automasi administrasi meningkatkan efektivitas penerimaan daerah dan kemandirian fiskal, sehingga hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori optimalisasi dalam konteks daerah dengan tingkat kemandirian fiskal rendah.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pemahaman komprehensif mengenai optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar melalui empat dimensi utama secara simultan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada kontribusi nominal atau efisiensi parsial, penelitian ini menganalisis keterkaitan antar-dimensi yang memengaruhi penerimaan dan dampaknya terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa integrasi digital, transparansi, dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan kontribusi retribusi pasar terhadap kemandirian fiskal daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara belum mencapai tingkat maksimal pada semua dimensi yang diteliti. Temuan ini memperkaya literatur keuangan publik daerah, memberikan referensi empiris bagi perumusan kebijakan pengelolaan PAD, dan menegaskan pentingnya penerapan teori optimalisasi pendapatan daerah secara komprehensif untuk mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah (Nurcholis, 2018; Safitri & Sari, 2022; Susilo, 2022; Leilani & Wulandari, 2023; Rahmadany, 2024; Suryanata & Felani, 2023; Wang et al., 2024; Vidyattama, 2021).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Padang Lawas Utara belum terlaksana secara maksimal. Dimensi

efektivitas pemungutan menunjukkan fluktuasi realisasi penerimaan yang belum konsisten mencapai target, efisiensi pengelolaan masih bergantung pada sistem administrasi manual, transparansi dan akuntabilitas berjalan namun belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem digital, serta inovasi dan digitalisasi baru diterapkan secara parsial pada beberapa pasar. Secara keseluruhan, kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah masih relatif rendah dibandingkan potensi yang tersedia.

Temuan ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Semua dimensi yang dianalisis—efektivitas pemungutan, efisiensi pengelolaan, transparansi dan akuntabilitas, serta inovasi dan digitalisasi—merupakan faktor kunci dalam mendukung penerimaan yang lebih optimal, sesuai dengan teori optimalisasi pendapatan daerah (Nurcholis, 2018). Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian mengenai analisis optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Keterbatan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil penelitian. Dari aspek waktu, penelitian dilakukan dalam periode yang terbatas sehingga pengamatan terhadap perkembangan penerimaan retribusi pelayanan pasar hanya dapat dilakukan berdasarkan data yang tersedia pada saat penelitian berlangsung. Dari aspek lokasi, penelitian hanya dilaksanakan di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan fokus pada pengelolaan retribusi pelayanan pasar, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan fiskal yang berbeda. Dari aspek data, penelitian menggunakan data penerimaan retribusi pelayanan pasar dan Pendapatan Asli Daerah yang tersedia pada instansi terkait, sehingga analisis sangat bergantung pada kelengkapan dan akurasi data yang diperoleh. Selain itu, dari aspek informan, penelitian hanya melibatkan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan dan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, sehingga informasi yang diperoleh masih terbatas pada perspektif para pihak yang menjadi subjek penelitian. Meskipun demikian, penelitian ini tetap berupaya menjaga kredibilitas temuan melalui penggunaan berbagai sumber data dan teknik triangulasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai optimalisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangka waktu pengamatan agar dapat mengevaluasi perkembangan penerimaan retribusi pelayanan pasar secara lebih menyeluruh dan melihat tren jangka panjang. Selain itu, perluasan lokasi penelitian ke beberapa kabupaten atau kota dengan karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda akan memungkinkan generalisasi temuan dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai optimalisasi retribusi pelayanan pasar di berbagai konteks daerah.
Selanjutnya, penelitian mendatang dapat menggunakan data yang lebih lengkap dan terintegrasi, termasuk penggunaan sistem digitalisasi penerimaan retribusi, untuk meningkatkan akurasi dan validitas temuan. Penelitian berikutnya juga disarankan melibatkan informan dari berbagai tingkat kepentingan dan perspektif, seperti pengelola pasar, pedagang, masyarakat pengguna fasilitas, dan pejabat daerah dari berbagai instansi terkait, sehingga informasi yang diperoleh dapat mencerminkan gambaran yang lebih holistik mengenai pengelolaan retribusi pelayanan pasar. Langkah-langkah

tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang optimal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif dalam penyusunan artikel repository ini. Terima kasih kepada instansi terkait, dosen pembimbing, dan seluruh informan yang telah bersedia memberikan data, informasi, dan masukan yang sangat berharga, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan kepada lembaga yang menyediakan akses data resmi dan literatur ilmiah yang mendukung kelengkapan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Akbar, B. (2020). *Akuntabilitas publik dan kinerja keuangan pemerintah daerah*. Kencana.

Eljawati, E., & Nurafdaliana, N. (2024). Optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 11*(2), 125–140. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4651

Ermawati, D., & Mutiara, N. (2024). Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari e-retribusi pasar di Pasar Kanigoro Kabupaten Blitar. *Otonomi, 24*(1), 197–202. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4195170

Gatiningsih, & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan*. CV Pustaka Setia.

Hasanah, N., Putri, A. S., & Rahman, A. (2025). Empirical evidence on the role of local own-source revenue in strengthening fiscal independence of Indonesian local governments. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 9*(1). https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/2788

Leilani, D. M., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh retribusi pelayanan pasar dan pelayanan parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan inflasi sebagai variabel moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 5*(2), 347–356. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4480

Nurcholis, H. (2018). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. Grasindo.

Pitono, A., & Kartiwi. (2020). *Pemerintahan daerah dan pelayanan publik*. IPDN Press.

Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi digital pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan agile government. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 15*(2), 145–159. https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/4809

Safitri, A., & Salahudin, F. M. (2024). Analisis efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pasar serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2017–2021. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan, 5*(2), 140–153. https://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunbisnis/article/view/4062

Simangunsong, F. (2015). *Metodologi penelitian pemerintahan*. Alfabeta.

Sueb, M., Mukti, M., & Yulita, K. (2025). Regional tax, retributions, and own-source revenue performance of Bekasi City. *Journal of Applied Accounting and Taxation, 10*(1), 26–38. https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAAT/article/view/8196

Suryanata, I. P. A., & Felani, H. (2023). Implementasi kebijakan e-retribusi pasar tradisional dalam rangka pencegahan kebocoran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 10*(1), 15–28. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3097

Susilo, S. (2022). Optimalisasi retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan), 6*(3), 337–352. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.4977

Syahrimi, S., Hidayat, A., & Yulianita, A. (2025). Fiscal decentralization, monetary policy, and economic growth in Indonesia: A panel data analysis. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 13*(4), 581–596. https://online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/42111

Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2*(2), 98–114. https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666

Taliziduhu, N. (2015). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru* (Jilid 1). Rineka Cipta.

Tumija, T., & Sinta, G. (2022). Analisis rasio keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 9*(2), 167–181. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2806

Usfomeny, Y. A., De Roosari, P. E., & Tungga, C. A. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2*(3), 118–130. https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.636

Vidyattama, Y. (2021). Decentralization and fiscal autonomy at the subnational level in Indonesia. *Southeast Asian Economies, 38*(3), 320–335. https://doi.org/10.1355/ae38-3c

Wang, Y., Huang, X., Zhang, T., Jiang, B., & Wang, X. (2024). Impact of fiscal decentralization and local government competition on the supply of basic public services: Based on the empirical evidence of prefecture-level cities in China. *Heliyon, 10*(4), e26511. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26511

Wasistiono, S., & Simangunsong, F. (2015). *Metodologi ilmu pemerintahan*. IPDN Press.